

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris, yang menjadikan sektor pertanian menjadi sektor utama dalam menyerap jumlah tenaga kerja cukup tinggi dari sektor lain. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa jumlah penduduk Indonesia yang bekerja adalah sebanyak 135,61 juta penduduk dimana 29,96% diserap oleh sektor pertanian (Statistik, 2022). Sektor pertanian ini menjadi salah satu pilar yang menunjang ketersediaan pangan guna mewujudkan upaya pembangunan nasional (Masrukhin, 2019). Sektor pertanian merupakan sektor unggulan, bukan berarti tidak terdapat permasalahan dan tantangan didalamnya.

Permasalahan yang bisa disebut sebagai isu abadi dalam dunia pertanian salah satunya adalah pengalihan fungsi lahan, yang muncul sebagai konsekuensi dari pengembangan wilayah (Radhika & Hatmoko, 2017), hal tersebut bisa memicu kemiskinan petani, seperti yang diungkapkan Harya (2019) bahwa tenaga kerja sektor pertanian dihantui belenggu kemiskinan. Lahan tanah merupakan sumber daya alam berupa tanah ini sifatnya terbatas, diharapkan lahan tanah yang dipergunakan dapat digarap dengan bijaksana. Seperti halnya lahan pertanian, lahan pertanian dapat diartikan sebagai suatu tanah yang digarap untuk melakukan budidaya komoditas pertanian (Gunawan *et al.*, 2021).

Lahan pertanian yang merupakan tiang penyangga bagi masyarakat Indonesia yang membawa nilai ekonomi sekaligus sosial, sehingga apabila alih guna lahan pertanian dilakukan tanpa terkendali akan menghujani masyarakat dengan dampak negatif baik dari aspek ekonomi, sosial maupun lingkungan, oleh karenanya lahan pertanian harus digarap dengan bijaksana (Apriyanto, 2022).

Penggunaan lahan yang tidak memadai pemanfaatannya atau sesuai peruntukannya dapat menimbulkan berbagai fenomena negatif dimana konsekuensinya dapat menjadikan keterhambatan dalam hal keharmonisan pembangunan bagi suatu negara (Suziedelyte Visockiene *et al.*, 2019).

Terdapat dua jenis lahan pertanian, yang pertama adalah lahan pertanian kering dimana suatu lahan berada dalam kondisi tanah yang tidak mempunyai sumber air yang memadai, biasanya dipergunakan untuk tanaman kacang-kacangan ataupun umbi-umbian. Lain ada lahan pertanian basah adalah suatu lahan dengan kontur tanah yang jenuh dengan air, dimanfaatkan untuk aktivitas produksi tanaman padi. Bagi petani, lahan adalah tempat bercocok tanam dan merupakan sumber kehidupan, sayangnya saat ini lahan pertanian dinilai tidak lebih memberikan keuntungan jika dibandingkan dengan aktivitas industri, sehingga terjadilah kemerosotan luas lahan pertanian (Ante *et al.*, 2016)

Fenomena pengalihan fungsi lahan dapat dimaknai sebagai proses pengubahan baik hanya sebagian maupun keseluruhan area tanah dari peranannya yang semula untuk peranan yang berbeda, dimana akan memberikan dampak kepada lingkungan dan potensi yang dimiliki lahan itu sendiri (Rezki *et al.*, 2020). Menurut Masrukhin (2019) alih fungsi lahan pertanian diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pembangunan jalan, pemukiman, atau peningkatan sektor ekonomi lainnya. Fenomena alih guna lahan pertanian ini setiap tahunnya mengalami peningkatan, padahal peran lahan pertanian cukup penting (Atasa *et al.*, 2022).

Pertumbuhan kebutuhan lahan cenderung meningkat sejalan dengan permintaan terhadap suatu jenis komoditas. Permintaan pertambahan luas lahan bergantung pada jenis komoditas baik pertanian maupun non pertanian yang sedang diproduksi, hal tersebut memicu terjadinya alih fungsi lahan (Iqbal *et al.*, 2020).

Statistik pertanian luas lahan pertanian di Indonesia mulai tahun 2015-2019, menunjukkan bahwa laju peningkatan alih guna lahan pertanian di Indonesia cenderung stabil dan menurun, ditambah lagi berdasarkan penelitian dari Widayanti (2022) memberikan informasi bahwa terhitung dari tahun 2004-2018 laju konsumsi beras bersifat fluktuatif. Pada tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan terhadap luasan lahan pertanian, mulai dari lahan jenis sawah, ladang huma, dan lahan yang tidak diusahakan sementara. Disusul tahun 2019 dimana luas lahan ladang huma turun lebih dari 120.000 hektar dari tahun 2018, atau terjadi penurunan sebanyak 1,29% (Kementrian Pertanian, 2020).

Indikator pertanian adalah indikator pengukur bagi perkembangan di sektor pertanian yang asalnya dari data statistik pertanian, dengan dasar pertimbangan salah satunya melalui perkembangan luas lahan pertanian. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), memprediksikan luas lahan panen padi di Indonesia pada tahun 2023 akan terjadi penurunan dari luasan lahan 10,45 juta hektar ditahun 2022 menjadi 10,20 juta hektar. Penurunan tersebut hampir menyentuh angka 255,79 ribu hektar atau dalam angka persentase 2,45%.

Terjadinya penurunan lahan pertanian khususnya yang diusahakan untuk komoditas padi di Indonesia terlihat jelas di salah satu provinsi di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur yang mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Tanaman pangan padi yang diproduksi di Jawa Timur menyumbang 50% untuk kebutuhan pangan di negara Indonesia. Fakta ini mengisyaratkan bahwa Provinsi Jawa Timur adalah sentral bagi kecukupannya kebutuhan nasional. Hal tersebut merupakan kabar baik, akan tetapi hal baik juga bisa berjajar dengan hal mengkhawatirkan lainnya. Negara juga tidak hanya mengembangkan sektor pertanian saja, namun pengembangan sektor lain yang merupakan sektor sekunder

bahkan tersier untuk memperbaiki perekonomian bangsa. Hal tersebut tentunya akan memberikan akibat buruk bagi lahan pertanian yang akan digerus untuk merealisasikan pengembangan di sektor non pertanian tersebut (Fauziah, 2020).

Tabel 1.1. Luas Lahan Panen Komoditas Padi di Pulau Jawa Tahun 2020 – 2022

Provinsi	Luas Lahan Panen (ha) Menurut Provinsi		
	2020	2021	2022
DKI Jakarta	914.51	559.97	477.25
Jawa Barat	1586888.60	1604109.31	1662404.00
Jawa Tengah	1666931.49	1696712.30	1688670.00
DI Yogyakarta	110548.12	107506.16	110927.20
Jawa Timur	1754380.30	1747481.20	1693211.00
Banten	325333.24	318248.46	337240.70

Sumber : Data Badan Pusat Statistik 2022

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2022), Provinsi Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki julukan lumbung pangan nasional dimana memiliki lahan pertanian padi dengan luas 1.754.380,30 ha di tahun 2020, sayangnya kini terjadi bibit permasalahan terkait luasan lahan dimana mengalami penurunan yang tidak sedikit menjadi 1.693.211 ha di tahun 2022. Parahnya diperkirakan menurunnya luas lahan pertanian untuk komoditas padi ini akan terjadi kembali di tahun 2023 menjadi 1.680.000 ha, artinya turun sebanyak 0,45% dari tahun 2022, saat lahan sawah berkurang maka hasil padi juga akan berkurang sedangkan konsumsi penduduk terus meningkat (BPS, 2023).

Penurunan luas lahan pertanian yang terjadi di Indonesia, salah satunya diakibatkan oleh meningkatnya kebutuhan perluasan area pertambangan yang seringkali menimbulkan banyak perdebatan. Alih guna lahan pertanian untuk area pertambangan akan menjadi persoalan besar ketika menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengesampingkan asas keberlanjutan (Wahyuningtyas, 2022). Keberadaan industri pertambangan di Indonesia cukup membawa konsekuensi

negatif sekaligus positif terhadap masyarakat. Aktivitas dialih fungsikannya lahan pertanian menjadi area pertambangan juga membawa konsekuensi negatif berkepanjangan diantaranya mengganggu produktivitas tanah, mengurangi jumlah produksi hasil pertanian, penurunan pendapatan petani, perubahan sosial masyarakat, serta munculnya berbagai konflik dan ketegangan antara pihak pertambangan dengan masyarakat apabila wilayah pertambangan berlokasi di kawasan hutan, perkebunan, persawahan, dan tanah yang merupakan milik adat masyarakat atau tanah hak milik penduduk. Namun, dari segi positif dari adanya industri pertambangan diantaranya terkait pemenuhan permintaan pasar dalam negeri dan internasional terhadap produk hasil pertambangan, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara, dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Kaafah, 2016).

Salah satu fakta miris bahwa pertambangan di Indonesia bahwasanya dari seluruh jumlah kepemilikan Blok Migas, hanya 25% yang dikuasai negara, sedangkan sisanya merupakan milik perusahaan asing seperti *Chevron*, *Total*, *Hess*, *Petrochina*, *Exxon* dan lain-lain. Daerah di Jawa Timur dengan potensi minyak dan gas yang cukup memadai salah satunya ada di Bojonegoro. Area pengembangan pertambangan di Bojonegoro terletak di blok Banyu Urip, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Industri Migas ini merupakan milik *Exxon Mobile* dari Amerika yang mengambil hak kepemilikan blok awal dari *Royal Dutch Shell* sedari Februari 2001 (Kaafah, 2016).

Perubahan fungsi lahan pertanian di Bojonegoro dibuktikan sekitar 700 hektar lahan pertanian telah dialihfungsikan untuk bisnis migas Blok Cepu. Tanah di Kecamatan Gayam adalah tanah gromosol yang cenderung kering, dengan luas lahan sawah di daerah tersebut pada tahun 2021 adalah seluas 2.418 ha.

Permasalahan berdirinya industri pertambangan migas *Exxon Mobile* di Kabupaten Bojonegoro yang berusaha memperluas wilayah tambangnya semakin memperkeruh suasana. Hilangnya lebih dari 700 hektar lahan pertanian guna pengembangan area pertambangan selain membuat lahan disekitarnya menjadi tidak produktif untuk berusaha tani juga beriringan dengan produksi padi yang juga hilang berkisar antara 2.439 – 4.044 per tahun dan jumlah pengangguran berada di angka 1.755 – 2.909 orang (Zaki *et al.*, 2017).

Berdasarkan penelitian Mardiansjah (2018) produksi pertanian yang cenderung menurun tersebut, utamanya terjadi pada produksi hasil pertanian pada lahan pertanian dengan radius 500 m dari pagar yang terpengaruh sorotan lampu pagar area pertambangan. Pendapatan petani pun nanti cenderung menurun karena frekuensi pekerjaan petani sudah berkurang banyak. Akibatnya saat ini petani banyak yang bekerja di luar daerah untuk mencari lahan garapan sebagai akibat berkurangnya lahan garapan yang ada di wilayahnya.

Alih fungsi lahan pertanian untuk pertambangan ini nantinya akan memengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bergantung pada lahan pertanian untuk penghidupan mereka (Abdulsalam *et al.*, 2016). Posisi ekonomi dari masyarakat semakin terombang ambing. Para petani mulai mencari alternatif selain mengandalkan pertanian untuk memenuhi kebutuhannya kebutuhan - kebutuhan mereka karena sebelumnya masyarakat Kecamatan Gayam hidup dengan bergantung pada sektor pertanian, namun sebagian besar petani memiliki tingkat pendidikan rendah, bahkan ada yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar, dan tidak memiliki keterampilan di sektor lain. Ketika menyangkut pekerjaan di sektor pertambangan minyak bumi, tidak semua petani atau anggota keluarganya memiliki kualifikasi untuk bekerja di sana. Menjadi pekerja tambang memerlukan

keahlian khusus dan tingkat pendidikan yang tinggi. Kondisi ini dapat memperburuk situasi sosial ekonomi petani karena tidak semua dari mereka mampu beradaptasi dengan perubahan tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga mereka (Mardiansjah, 2018).

Terdapat berbagai faktor yang berpengaruh terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan non-pertanian. Faktor yang memengaruhi ini dibagi menjadi dua kategori yaitu, diantaranya adalah faktor langsung atau biasa dikenal dengan faktor mikro, dan faktor tidak langsung atau faktor makro. Faktor mikro ini terdiri dari kondisi sosial petani yang meliputi pendidikan yang pernah mereka tempuh, jumlah pendapatan, luas lahan disebut sebagai faktor langsung atau faktor mikro dikarenakan faktor yang termaksud didalamnya mampu memengaruhi keputusan petani secara langsung dalam memutuskan lahan akan dialih fungsikan atau tidak (Noviyanti & Sutrisno, 2021). Penelitian Dhanang (2017) menambahkan yang termasuk faktor mikro ada indikator usia petani.

Kedua adalah faktor makro yaitu suatu faktor dimana tidak secara langsung berperan dalam memengaruhi keputusan petani dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian, diantaranya adalah kebijakan dan jangkauan lahan. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah mampu memberikan kerangka bagaimana mekanisme hukum dalam mengatur lahan pertanian seharusnya digunakan. Jangkauan lahan dari area pengembangan juga akan turut memengaruhi tanah tersebut akan dialih fungsi atau tidak, semakin dekat dengan sumber pengembangan maka semakin besar peluang untuk dialih fungsi, hal tersebut karena semakin berjalannya waktu lahan tersebut akan kehilangan produktivitasnya (Wicaksono & Lestari, 2017).

Konsekuensi lain dari kegiatan alih fungsi lahan pertanian yang dirasakan masyarakat adalah perubahan dari segi berubahnya jumlah pendapatan mereka,

namun bukan berarti ini bersifat merugikan . Terdapat beberapa kemungkinan yang akan terjadi nantinya, antara pendapatan petani bisa tetap tanpa perubahan, terjadi penurunan, atau justru terjadi kenaikan pendapatan. Terjadinya kemungkinan-kemungkinan tersebut dipicu oleh keberadaan beberapa faktor, seperti apakah petani nantinya setelah melakukan alih fungsi lahan tetap bisa menjadi petani penggarap, ataukah mereka harus beralih mata pencaharian menjadi buruh tani, pegawai pabrik, ataupun pedagang (Putra & Ismail, 2018).

Bergesernya pola kehidupan khususnya dari segi sosial ekonomi masyarakat pedesaan akan terjadi bersamaan dengan aktivitas alih fungsi lahan pertanian yang dijalankan. Masyarakat yang terdampak alih guna lahan akan merasakan perubahan sebagai dampak lingkungan dan ekonomi yang saling berhubungan dimana dengan menurunnya lahan pertanian yang masih produktif sebagai implikasi pembangunan area industri tersebut menjadikan petani yang tidak memiliki usaha lain mengalami guncangan ekonomi Raafi *et al* (2023).

Kabupaten Bojonegoro menyimpan sekitar 40 sumur yang diprediksikan menyimpan kekayaan alam berupa 600 juta barel minyak, dan lebih dari 2 triliun kaki kubik (TCF). Beberapa sumur di Kabupaten Bojonegoro tersebut direncanakan akan dikelola sepenuhnya oleh perusahaan *Exxon Mobile*. Lokasi fasilitas pemrosesan terpusat dari minyak dan gas tersebut diperkirakan memerlukan lebih dari 600 hektar lahan yang akan tersebar di desa dari Kecamatan Gayam, yaitu Desa Gayam, Bonorejo, Brabowan, Ringin Tunggal, Mojodelik, Begadon dan Katur. Ketujuh desa tersebut yang akan mengalami perubahan penggunaan lahan yang mereka kelola, dari wilayah pemukiman dan area pertanian, akan dialih fungsikan menjadi area pemrosesan dan pengeboran minyak dan gas yang dikelola perusahaan asing (Zaki *et al.*, 2017). Kabupaten Bojonegoro yang memiliki sumber

daya alam melimpah, namun keberlimpahan yang dimiliki tidak menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Hal tersebut salah satunya karena adanya industri pertambangan dari perusahaan asing untuk mengeksploitasi minyak dan gas di Kecamatan Gayam. Akibatnya dari waktu ke waktu masyarakat sekitar menerima dampak utamanya di sektor pertanian (Kaafah, 2016).

Upaya untuk melindungi masyarakat melalui kebijakan sektor pertambangan yang disusun dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi dana Desa, Bagi Hasil Pajak, dan Bagi Hasil Retribusi. Langkah inovatif yang diambil Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah dengan mengalokasikan 12,5 % dari Dana Bagi Hasil Migas untuk seluruh desa di Bojonegoro. Pembagiannya yaitu sebanyak 60% dari alokasi 12% tersebut di bagi secara merata ke seluruh Desa di Bojonegoro, kemudian sesuai ADHD Migas Proporsional, 40% sisanya faktor wilayah menjadi dasar pembagian secara proporsional (Kaafah, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang Dampak Alih fungsi Lahan Pertanian Menjadi Area Pertambangan Minyak dan Gas dengan studi kasus di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan faktor apa saja yang memengaruhi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, serta menjelaskan bagaimana dampak alih fungsi lahan terhadap perubahan sosial ekonomi petani di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini tidak mencakup semua aspek sosial ekonomi petani secara mendalam, melainkan difokuskan dampaknya terhadap peralihan mata pencaharian petani yang mewakili aspek sosial dan pendapatan yang mewakili sektor ekonomi dengan perbandingan sebelum dan sesudah terjadi peralihan fungsi lahan pertanian mereka.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi peralihan lahan pertanian untuk industri pertambangan minyak dan gas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian untuk industri pertambangan minyak dan gas terhadap perubahan sosial ekonomi petani di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi peralihan lahan pertanian menjadi industri pertambangan minyak dan gas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.
2. Menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi industri pertambangan minyak dan gas terhadap perubahan sosial ekonomi petani di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian skripsi terkait Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Pertambangan Minyak dan Gas di Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro sebagai sarana menginterpretasikan hasil penelitian tentang alih fungsi lahan di wilayah kajian dengan dasar teoritis, penulis dapat menjelaskan makna temuan dan implikasinya secara lebih mendalam, memberikan titik awal dalam melakukan perbandingan dampak alih fungsi lahan pertanian di daerah lainnya, yang mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam tentang perbedaan dalam dampak sosial ekonomi. Selain itu hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dengan mempertimbangkan dampak dari alih fungsi lahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Manfaat yang didapatkan penulis terhadap penelitian ini adalah sebagai sarana pelatihan peningkatan keterampilan dalam upaya menyalurkan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi penelitian bidang agribisnis khususnya terkait alih fungsi lahan pertanian.

2. Bagi Fakultas Pertanian

Hasil penelitian skripsi ini dapat dijadikan sumber rujukan informasi, referensi dan memicu penelitian yang serupa bagi mahasiswa dan fakultas untuk melakukan penelitian lanjutan terkait topik alih fungsi lahan pertanian. Penelitian ini mempunyai relevansi secara langsung terhadap wilayah Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan bahwa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur memperhatikan dan mampu berkontribusi terhadap permasalahan sektor pertanian setempat.